

Kajian Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman di Kawasan Bontorannu Kota Makassar

Nini Apriani Rumata^{*1}, Nurul Ilma², Nur Miftahul Janna², Lismayanti Nurdin²

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Makassar

²Mahasiswa Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Makassar

ABSTRAK

Pesatnya pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan menjadi alasan utama terjadi pengembangan dalam suatu wilayah kota. Kondisi keterbatasan lahan dan tingginya kebutuhan masyarakat di kawasan perkotaan akan perumahan mengakibatkan kawasan permukiman semakin padat dan membentuk kawasan permukiman kumuh. Kawasan Permukiman Bontorannu merupakan salah satu kawasan dengan identitas kawasan kumuh yang berada di Kecamatan Mariso Kota Makassar. Kawasan ini memiliki luas wilayah 2.968 Ha. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tingkat kekumuhan kawasan permukiman di kawasan Bontorannu. Kawasan Permukiman Bontorannu dibagi menjadi 2 zona yaitu Zona A Kelurahan Bontorannu dan Zona B Kelurahan Mattoangin. Metode yang digunakan adalah metode analisis skoring dan analisis deskriptif. Metode analisis skoring dilakukan dengan menggunakan 7 indikator yaitu Kondisi Bangunan, Jalan, Air Minum, Drainase, Sanitasi, Persampahan dan Proteksi Kebakaran untuk menghasilkan penilaian tingkat kekumuhan kawasan permukiman di kawasan Bontorannu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Zona A Kelurahan Bontorannu memiliki Skor 32 sehingga dikategorikan kawasan kumuh ringan sedangkan Zona B Kelurahan Mattoangin memiliki skor 24 sehingga dikategorikan sebagai kawasan kumuh ringan. Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa metode analisis dalam mengidentifikasi tingkat kekumuhan permukiman serta sebagai acuan dalam program penanganan kawasan kumuh di Kawasan Permukiman Bontorannu.

ABSTRACT

The rapid population growth in urban areas has become a primary reason for the occurrence of development in a city region. The limited land conditions and the high needs of the population in urban areas for housing result in increasingly dense residential areas, forming slum settlements. Bontorannu Residential Area is one of the areas with a slum identity located in the Mariso Sub-district of Makassar City. This area covers a land area of 2,968 hectares. The objective of this study is to analyze the level of slumness in the residential area of Bontorannu. The Bontorannu Residential Area is divided into 2 zones: Zone A, comprising the Bontorannu Village, and Zone B, comprising the Mattoangin Village. The method employed involves scoring analysis and descriptive analysis. The scoring analysis method is conducted using 7 indicators: Building Conditions, Roads, Drinking Water, Drainage, Sanitation, Waste Management, and Fire Protection. These indicators are used to assess the level of slumness in the residential area of Bontorannu. The results of this study indicate that Zone A, Bontorannu Village, has a score of 32, categorizing it as a lightly slummed area. Meanwhile, Zone B, Mattoangin Village, has a score of 24, also categorized as a lightly slummed area. This research provides benefits in the form of an analysis method for identifying the level of slumness in residential areas, as well as serving as a reference for slum area management programs in the Bontorannu Residential Area.

ARTICLE HISTORY

Received July 05, 2023

Received in revised form

July 17, 2023

Accepted August 15, 2023

Available online August 31, 2023

KEYWORDS

Makassar, Perkotaan, Permukiman, Permukiman Kumuh, Wilayah

1. Pendahuluan

Perkembangan wilayah kota yang dinamis membawa berbagai macam dampak bagi pola kehidupan masyarakat kota itu sendiri, antara lain peningkatan kebutuhan kawasan permukiman [1]. Perkembangan wilayah kota yang semakin meningkat menimbulkan beberapa permasalahan bagi masyarakat itu sendiri, salah satunya yaitu peningkatan kebutuhan kawasan permukiman. Masalah terkait perumahan dan permukiman merupakan masalah yang

tidak akan ada habisnya karena dapat disimpulkan bahwa perumahan dan permukiman merupakan satu kesatuan yang berada pada satu ruang lingkup dengan berbagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat [2].

Perkembangan pesat urbanisasi menjadikan kawasan permukiman semakin padat hingga membentuk kawasan permukiman kumuh. Hal yang melandasi adalah keinginan memiliki perubahan pendapatan dan kondisi hidup yang

lebih baik, penduduk melakukan perpindahan atau migrasi [3]. Perpindahan ini menimbulkan kepadatan penduduk [4] yang berujung pada terciptanya lingkungan yang tidak sehat [5]. Kurangnya fasilitas ekonomi dan sumber daya juga memicu kemiskinan di wilayah kumuh [6], dan lingkungan yang kumuh dapat merusak kesehatan [7].

Kawasan kumuh dianggap sebagai salah satu masalah paling di beberapa negara berkembang karena mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial bagi suatu negara, dimana hampir 1 miliar atau 32% dari populasi perkotaan dunia bertempat tinggal di kawasan kumuh [8]. Putri, Ridlo [9] menyatakan bahwa kawasan permukiman mengalami penurunan kualitas lingkungan fisik, sosial ekonomi dan sosial budaya dan dihuni oleh orang-orang dengan pendapatan ekonomi kebawah, jumlah penduduk yang padat dan ketersediaan sarana dan prasarana yang minim. Berdasarkan Data dari Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2014, terdapat 38,431 ha Kawasan kumuh yang tersebar di Indonesia, dimana sekitar 23,473 ha atau 61.1% berada di perkotaan dan 11,957 ha atau 31.1 berada di perdesaan [10].

Kawasan Bontorannu merupakan salah satu kawasan dengan identitas kawasan kumuh yang berada di Kecamatan Mariso Kota Makassar. Kawasan ini memiliki luas wilayah 2.968 Ha serta keliling 2.688 m dengan posisi kawasan, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mattoanging, sebelah Barat berbatasan dengan laut Kota Makassar, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tamarunang dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Maccini Sombala. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan kawasan permukiman di Kawasan Bontorannu memiliki permasalahan-permasalahan yang harusnya tidak dimiliki oleh kawasan permukiman, antara lain adanya kepadatan dan kondisi fisik bangunan, kondisi permukiman yang tidak teratur, kurangnya sarana pendukung atau fasilitasnya yang kurang memadai. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut maka dilakukan kajian untuk mengetahui tingkat kekumuhan di Kawasan Bontorannu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kekumuhan kawasan permukiman di kawasan Bontorannu.

1.1. Kajian Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ditegaskan bahwa permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Sasaran pembangunan kawasan permukiman mencakup tujuh hal, yaitu : (a) Pengentasan permukiman kumuh di perkotaan, (b) pembuatan dokumen perencanaan infrastruktur permukiman, (c) terpenuhinya pelayanan air minum, (d) Optimalisasi penyediaan layanan air minum. (e)

peningkatan efisiensi layanan air minum melalui prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional. (f) tercapainya akses sanitasi yang layak untuk air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan. (g) Meningkatkan keamanan dan keselamatan bangunan gedung dan keserasiannya terhadap lingkungan [11].

1.2. Kajian Kawasan Permukiman Kumuh

Menurut Mardhanie [12] Perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, kurang terarah dan terencana, serta kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi, sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai "Kawasan Kumuh".

Permukiman kumuh adalah suatu kawasan dengan bentuk hunian yang tidak berstruktur, tidak berpola (misalnya letak rumah dan jalannya tidak beraturan, tidak tersedianya fasilitas umum, prasarana dan sarana air bersih, MCK) bentuk fisiknya yang tidak layak misalnya secara reguler tiap tahun banjir [13]. Suatu kawasan permukiman ataupun bukan kawasan permukiman yang dijadikan tempat tinggal, dengan bentuk fisik bangunan yang tidak memenuhi standar atau tidak layak huni, umumnya dihuni oleh masyarakat miskin dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota [14].

Menurut Putri, Ridlo [9], kawasan kumuh atau slum area adalah suatu wilayah permukiman dengan kondisi bangunan dan kondisi lingkungan yang tidak sehat dan tergolong kotor tetapi wilayah tersebut umumnya status kepemilikan lahannya jelas tetapi kesadaran akan pentingnya kesehatan lingkungan tidak. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Salah satu penyebab tingginya resistensi dari penghuni permukiman kumuh adalah keinginan untuk tetap berada di lokasi semula berupa jarak dekat antara permukiman dan pusat-pusat lapangan kerja yang digeluti [15]. Menurut Monica, Jamika [16] ciri dari permukiman kumuh adalah: 1) penghuni berasal dari desa yang sama sehingga memungkinkan homogenitas yang agak besar, 2) tingkat Pendidikan adalah tamatan Sekolah Dasar atau putus sekolah, 3) Dalam menyambung hidup mengandalkan otot masing-masing serta memiliki banyak waktu luang, 4) belum terorganisasi menurut badan hukum usaha yang lazim berlaku, 5) bekerja pada sektor informal, 6) kompleks permukiman padat dan letak permukiman tidak teratur, 7) fasilitas elementer, 8) Bangunan tempat bermukim serba sederhana terbuat dari bahan serupa, 9) penghuni memiliki semangat kekeluargaan, 10) kesadaran hidup beragama. Struktur ekonomi masyarakat yang tinggal di Permukiman Kumuh Sebagian besar merupakan masyarakat menengah kebawah dengan tingkat pendapatan rendah [17-20].

2. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif berdasarkan sumber data. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati [21]. Penelitian kuantitatif merupakan suatu konsep penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data numerik [22]. Metode deskriptif yaitu metode-metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat [23]. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang terkumpul secara sistematis, faktual dan cermat terhadap fakta atau karakteristik yang diteliti [24].

Metode pengumpulan data membahas tentang alat atau teknik pengumpulan data dan prosedur penelitian dilakukan meliputi pencatatan data, kebutuhan data yang

diperlukan, dan langkah-langkah penelitian selanjutnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder [25].

Untuk mengetahui tingkat kekumuhan di kawasan Bontorannu ini lebih difokuskan pada komponen fisik, melalui metode analisis skoring atau pembobotan dengan panduan variabel dan indikator permukiman kumuh. Indikator tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Adapun indikator tersebut berjumlah 7 indikator yaitu Kondisi Bangunan, Jalan, Air Minum, Drainase, Sanitasi, Persampahan dan Proteksi Kebakaran. Hasil dari keseluruhan penjumlahan nilai skoring akan dikelompokkan menjadi:

- Nilai 14 – 32 Tergolong kumuh Ringan
- Nilai 33 – 51 Tergolong Kumuh Sedang
- Nilai 52 – 70 Tergolong Kumuh Berat.

Tabel 1. Variabel, Kriteria dan Indikator Penelitian

No	Variabel	Kriteria	Indikator
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan Kepadatan Bangunan Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan meliputi pengaturan bentuk, besaran dan peletakan • Tidak memenuhi ketentuan tata kualitas lingkungan meliputi pengaturan blok lingkungan, ketinggian dan wajah jalan • Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha • Untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha • Keselamatan bangunan gedung • Kesehatan bangunan gedung • Kenyamanan bangunan gedung • Kemudahan bangunan gedung
2	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Pemukaan Jalan Lingkungan Struktur Jalan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukiman jalan pada lokasi perumahan atau permukiman Sebagian lokasi permukiman memiliki struktur jalan berupa aspal, kerikil, paving atau tanah.
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketidakterediaan Akses Air Minum	Masyarakat pada lokasi permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa
4	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase Jenis Drainase Lingkungan Ketidakterediaan Drainase	<p>Kualitas konstruksi drainase buruk, karena Berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan.</p> <p>Tidak tersedianya jenis drainase lingkungan pada lingkungan permukiman, yaitu drainase terbuka dan tertutup.</p> <p>Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan permukiman.</p>
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai dengan Persyaratan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Mayoritas rumah tangga tidak memiliki kloset yang terhubung <i>septictank</i> atau tidak terlayani MCK • Mayoritas rumah tangga memiliki kloset yang terhubung <i>septic tank</i> atau terlayani MCK
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan	<p>Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga • Tempat pengumpulan sampah (TPS) pada skala lingkungan • Gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	Kondisi Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu pasokan air dan jalan lingkungan, Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Permukiman Bontorannu, Kecamatan Mariso Kota Makassar. Permukiman Bontorannu dibagi berdasarkan administrasi kelurahan yaitu menjadi Zona A Kelurahan Bontorannu dan Zona B Kelurahan Mattoangin dengan tujuan untuk observasi dan analisis kekumuhan lebih detail, [Gambar 1](#).

2.2. Analisis

Metode analisis yang digunakan berupa deskriptif dan skoring dengan menggunakan 7 indikator yaitu Kondisi Bangunan, Jalan, Air Minum, Drainase, Sanitasi, Persampahan dan Proteksi Kebakaran.

2.2.1. Kondisi Bangunan

Acuan penilaian yang dilakukan dengan nilai 1% - 33% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan bangunan maka tergolong klasifikasi rendah dengan nilai bobot 1, nilai 34% - 66% bangunan pada lokasi penelitian yang tidak memiliki keteraturan maka tergolong klasifikasi sedang nilai bobot 3 dan juga nilai 67% - 100% bangunan pada lokasi penelitian yang tidak memiliki keteraturan nilai bobot 5, [Tabel 2](#).

2.2.2. Kepadatan Bangunan

Acuan penilaian yang dilakukan dengan nilai 1% - 33% kepadatan bangunan nilai bobot 1, dan nilai 34% - 66% kepadatan bangunan nilai bobot 3 dan juga nilai 67% - 100% kepadatan bangunan dengan nilai bobot 5, [Tabel 3](#).



Gambar 1. Peta delineasi kawasan Penelitian

Tabel 2. Kondisi Bangunan lokasi penelitian

No	Kawasan	Bangunan teratur (unit)	Bangunan tidak teratur (unit)	Jumlah bangunan (unit)	Persentase permukiman teratur (%)	Persentase permukiman tidak teratur (%)	klasifikasi
1	Zona A	524	702	1.126	46,54	62,34	Sedang
2	Zona B	385	183	568	57,63	32,22	Rendah

Tabel 3. Kepadatan bangunan lokasi penelitian

No	Kawasan	Luas area (Ha)	Jumlah bangunan (unit)	Kepadatan bangunan (unit)	klasifikasi
1	Zona A	13.970	1126	8	Rendah
2	Zona B	15.865	568	1	Rendah

Tabel 4. Tipe bangunan lokasi penelitian

No	Kawasan	Semi permanen (unit)	Permanen (unit)	Jumlah bangunan (unit)	Persentase semi permanen (%)	Persentase permanen (%)	klasifikasi
1	Zona A	864	262	1.126	76,73	23,27	Tinggi
2	Zona B	426	142	568	75	25	Tinggi

2.2.3. Ketidakesesuaian Dengan Persyaratan Teknis

Acuan penilaian yang dilakukan dengan nilai 1% - 33% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis maka tergolong klasifikasi rendah dengan nilai bobot 1, dan nilai 34% - 66% bangunan pada lokasi penelitian yang tidak memenuhi persyaratan teknis maka tergolong klasifikasi sedang dengan nilai bobot 3 dan juga nilai 67% - 100% bangunan pada lokasi penelitian yang tidak memenuhi persyaratan teknis maka tergolong klasifikasi yaitu tinggi, Tabel 4.

2.2.4. Kualitas Jalan Lingkungan

Acuan penilaian yang dilakukan dengan nilai 1%-33% kualitas jalan yang buruk maka tergolong rendah dengan nilai yang diberikan yakni 1, tergolong sedang dimana kualitas jalan yang buruk dengan 34% - 66% diberikan nilai 3 dan untuk nilai 67% - 100% yang memiliki kualitas buruk akan tergolong tinggi, Tabel 5.

2.2.5. Struktur Jalan Lingkungan

Acuan penilaian yang dilakukan dengan nilai 1% - 33% dengan struktur jalan paving blok dikategorikan rendah

dengan nilai 1, untuk kategori sedang yaitu 34% - 66% dengan struktur jalan paving blok maka nilainya 3 dan nilai 67% - 100% memiliki struktur jalan paving blok dikategorikan tinggi dengan nilai 5, Tabel 6.

2.2.6. Kondisi Penyediaan Air Minum

Acuan penilaian yang dilakukan jika penduduk Kawasan Bontorannu tidak dapat memilih air minum yang aman dengan 1% - 33% maka dikategorikan rendah dengan nilai 1, kategori sedang berada jika penduduk tidak dapat memilih air minum yang aman berkisar 34% - 66% maka nilai yang diberikan adalah 3 dan 67% - 100% dikategorikan tinggi dengan nilai 5.

Berdasarkan hasil survei dan analisis perhitungan jumlah rata - rata penyediaan air minum yang ada di Kawasan Bontorannu terbagi atas 2 yaitu :

- Pemakaian PDAM pada lokasi penelitian sebanyak 37%.
- Pemakaian sumur sebagai sumber penyediaan air bersih sebanyak 63%.

Tabel 5. Kualitas jalan lingkungan lokasi penelitian

No	Kawasan	Semi permanen (unit)	Kualitas jalan (m)			Persentase kualitas jalan (%)			Klasifikasi
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Zona A	5.050 m	1.860	2.332	858	36,83	46,18	16,99	Rendah
2	Zona B	5.102 m	3.239	417	1.446	63,48	8,17	28,34	Rendah

Tabel 6. Struktur jalan lingkungan lokasi penelitian

No	Kawasan	Panjang Jalan	Struktur Jalan		Persentase Struktur jalan (%)		Klasifikasi
			Aspal	Paving Blok	Aspal	Paving Blok	
1	Zona A	5.050 m	732 m	4.318 m	14,49	85,5	Tinggi
2	Zona B	5.102 m	1.772 m	3.330 m	34,73	65,27	Sedang

2.2.7. Kualitas Konstruksi Drainase

Acuan penilaian yang dilakukan dengan nilai 1%-33% kualitas drainase yang buruk maka tergolong rendah dengan nilai yang diberikan yakni 1, tergolong sedang dimana kualitas drainase yang buruk dengan 34% - 66% diberikan nilai 3 dan untuk nilai 67% - 100% yang memiliki kualitas buruk akan tergolong tinggi dengan nilai yang diberikan yakni 5, Tabel 7.

2.2.8. Jenis Drainase Lingkungan

Acuan penilaian yang dilakukan dengan nilai 1%-33% jenis drainase tertutup maka tergolong rendah dengan nilai yang diberikan yakni 1, tergolong sedang dimana jenis drainase tertutup dengan 34% - 66% diberikan nilai 3 dan untuk nilai 67% - 100% jumlah presentase jenis drainase tertutup diberikan nilai 5, Tabel 8.

2.2.9. Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan

Acuan penilaian yang dilakukan dengan nilai 1%-33% jika drainase hanya 1 sisi maka tergolong rendah dengan nilai yang diberikan yakni 1, tergolong sedang dimana drainase 1

sisi dengan 34% - 66% diberikan nilai 3 dan untuk nilai 67% - 100% jumlah analisis drainase 1 sisi jalan nilai 5, Tabel 9.

2.2.10. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Kondisi pengelolaan air limbah yang ada di Kawasan Bontorannu terkhusus MCK terdiri atas 2 macam yaitu MCK terletak diluar hunian dan MCK di dalam hunian.

2.2.11. Kondisi Persampahan

Permasalahan persampahan yang semakin meningkat terutama pada pembuangan sampah ke kanal menjadikan kanal yang ada di Kawasan Bontorannu menjadi tercemar berat. Sebagian besar wilayah di permukiman ini belum memiliki bak sampah yang layak.

2.2.12. Kondisi Proteksi Kebakaran

Acuan penilaian jika tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran pada lokasi dengan nilai 1% - 33% maka dikategorikan rendah dengan penilaian 1, untuk penilaian 3 kategori sedang memiliki persentase 34% - 66% dan untuk nilai 67% - 100% jika tidak memiliki proteksi kebakaran dan diberikan nilai 5 kategori tinggi.

Tabel 7. Kualitas Drainase lokasi penelitian

No	Kawasan	Panjang drainase	kualitas Drainase (m)			persentase kualitas Drainase (%)			Klasifikasi
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Zona A	3.639 m	1.635	1.109	895	44,93	30,47	24,59	Rendah
2	Zona B	3.756 m	858	1.159	1.739	22,84	30,86	46,3	Sedang

Tabel 8. Jenis Drainase lokasi penelitian

No	Kawasan	Panjang Drainase	Letak Drainase		Persentase letak drainase (%)		Klasifikasi
			1 sisi	2 sisi	1 sisi	2 sisi	
1	Zona A	3.639 m	2.602	1.037	71,50	28,50	Tinggi
2	Zona B	3.756 m	2.803	953	74,63	25,37	Tinggi

Tabel 9. Letak Drainase lokasi penelitian

No	Kawasan	Panjang Drainase	Jenis Drainase		Persentase Jenis Drainase (%)		Klasifikasi
			Terbuka	Tertutup	Terbuka	Tertutup	
1	Zona A	3.639 m	2.744	895	75,40	24,59	Rendah
2	Zona B	3.756 m	2.898	858	77,16	22,84	Rendah

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Zona A Kelurahan Bontorannu

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya maka Kelurahan Bontorannu memiliki klasifikasi

berkisar rendah, sedang dan tinggi. Berdasarkan hasil analisis skoring atau pembobotan tingkat kekumuhan di Kelurahan Bontorannu memiliki skor 32 dengan klasifikasi kumuh ringan, Tabel 10.

Tabel 10. Pembobotan Tingkat Kekumuhan Zona A

No	Aspek	Kriteria	Nilai Persentase			Klasifikasi	Bobot
			Rendah 1% - 33%	Sedang 34%-66%	Tinggi 66%-100%		
1	Bangunan	Ketidakteraturan Bangunan		✓		Sedang	3
		Kepadatan Bangunan	✓			Rendah	1
		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis			✓	Tinggi	5
2	Jalan	Kualitas Jalan	✓			Rendah	1
		Struktur Jalan			✓	Tinggi	5
3	Air Minum	Ketidakterediaan Akses Air minum		✓		Sedang	3
4	Drainase	Kualitas Drainase	✓			Rendah	1
		Jenis Drainase	✓			Rendah	1
		Ketidakterediaan Drainase			✓	Tinggi	5
5	Sanitasi	Prasarana Sanitasi Lingkungan		✓		Sedang	3
6	Persampahan	Prasarana persampahan	✓			Rendah	1
7	Proteksi Kebakaran	Kondisi Proteksi Kebakaran		✓		Sedang	3
Jumlah Skor							32

Tabel 11. Pembobotan Tingkat Kekumuhan Zona B

No	Aspek	Kriteria	Nilai Persentase			Klasifikasi	Bobot
			Rendah 1% - 33%	Sedang 34%-66%	Tinggi 66%-100%		
1	Bangunan	Ketidakteraturan Bangunan	✓			Rendah	1
		Kepadatan Bangunan	✓			Rendah	1
		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis			✓	Tinggi	5
2	Jalan	Kualitas Jalan	✓			Rendah	1
		Struktur Jalan		✓		Sedang	3
3	Air Minum	Ketidakterediaan Akses Air minum	✓			Rendah	1
		Kualitas Drainase		✓		Sedang	3
4	Drainase	Jenis Drainase	✓			Rendah	1
		Ketidakterediaan Drainase			✓	Tinggi	5
5	Sanitasi	Prasarana Sanitasi Lingkungan	✓			Rendah	1
6	Persampahan	Prasarana persampahan	✓			Rendah	1
7	Proteksi Kebakaran	Kondisi Proteksi Kebakaran	✓			Rendah	1
		Jumlah Skor					

3.2. Zona B Kelurahan Mattoangin

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya maka Kelurahan Bontomarannu memiliki klasifikasi berkisar rendah, sedang dan tinggi. Berdasarkan hasil analisis skoring atau pembobotan tingkat kekumuhan di Kelurahan Mattoangin memiliki skor 24 dengan klasifikasi kumuh ringan, Tabel 11.

Bontorannu dan Zona B Kelurahan Mattoangin memiliki tingkatan kekumuhan yang sama yaitu Kumuh Ringan. Dalam penanganan kawasan kumuh secara fisik sebaiknya dilakukan peningkatan kualitas yang mengacu pada indikator Kondisi Bangunan, Jalan, Air Minum, Drainase, Sanitasi, Persampahan dan Proteksi Kebakaran. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat setempat sebagai upaya dan pengendalian kondisi lingkungan permukiman yang kumuh.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pembobotan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kekumuhan antara Zona A Kelurahan

Daftar Pustaka

- [1] Wiarni S, Mononimbar W, Supardjo S. Analisis Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman di Kecamatan Kotamobagu Timur. Spasial. 2018;5(1):61-70.
- [2] Sari ARS, Ridlo MA. Studi Literature: Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan. Jurnal Kajian Ruang. 2022;1(2):160-76.
- [3] Herawati NR. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KAMPUNG TEMATIK DI KAMPUNG BATIK KOTA SEMARANG. Journal of Politic Government Studies. 2023;12(2):356-71.
- [4] Marx B, Stoker T, Suri T. The economics of slums in the developing world. Journal of Economic perspectives. 2013;27(4):187-210.
- [5] Goswami S, Manna S, Culture. Urban poor living in slums: a case study of Raipur city in India. Global Journal of Human Social Science Sociology. 2013;13(4):15-22.
- [6] Putra KE, Andriana M. Faktor Penyebab Permukiman Kumuh di Kelurahan Bagan Deli Belawan Kota Medan. Jurnal koridor. 2017;8(2):97-104.
- [7] Kahfi A. Tinjauan terhadap pengelolaan sampah. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. 2017;4(1):12-25.
- [8] Sunarti S, Esariti L, Rahdriawan M, Makhmudi DP. Kajian Strategi Penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Bangka Tengah. Journal of Regional Rural Development Planning. 2021;5(2):110-22.
- [9] Putri K, Ridlo MA, Widyasamratri H. Studi Literatur: Strategi Penanganan Permukiman Kumuh di Perkotaan. Jurnal Kajian Ruang. 2023;3(1):104-47.
- [10] Wihadanto A, Barus B, Achسانی NA, Bratakusumah DS. Analisis Karakteristik dan Penilaian Tingkat Kekumuhan Kawasan

- Permukiman 'Kampung Braga'-Kota Bandung. *Journal of Regional Rural Development Planning*. 2017;1(2):132-44.
- [11] Ervianto WI, Felasari S. Pengelolaan permukiman kumuh berkelanjutan di perkotaan. *Jurnal Spektran*. 2019;7(2):178-86.
- [12] Mardhanie AB. Penelitian Pemetaan Kawasan Kumuh Permukiman Kecamatan Tanjung Selor-Kabupaten Bulungan. *Jurnal Inersia*. 2013;5(1).
- [13] Wijaya DW. Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*. 2016;2(1):1-10.
- [14] Wijaya A, Ardalia F, Dewi EP. Pemanfaatan ruang komunal pada kawasan permukiman kumuh perkotaan di Manggarai Jakarta Selatan. *IKRA-ITH Teknologi Jurnal Sains dan Teknologi*. 2019;3(2):17-26.
- [15] Ridena S. Kemiskinan dan Lingkungan: Perspektif Kemiskinan di Perkotaan dan Perdesaan. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*. 2021;5(1):39-48.
- [16] Monica F, Jamika FI, Razak A, Handayuni L, Yuniarti E, Fauzi M. Literatur Review: Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Batang Arau Kota Padang terkait Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan. *Jurnal Serambi Engineering*. 2023;8(1).
- [17] Istikasari M, Khadiyanto P. Identifikasi permukiman kumuh di pusat Kota Jambi. *Ruang*. 2014;2(4):301-10.
- [18] Zulkarnaini WR, Elfindri E, Sari DT. Faktor-Faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh di Kota Bukittinggi. *Jurnal Planologi*. 2019;16(2):169-88.
- [19] Amin SFA. Analisis Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau pada Pemukiman Padat di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. *Jurnal Linears*. 2018;1(1):43-7.
- [20] Dollah AS, Rasmawarni R. Struktur Sebaran Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar. *Jurnal Linears*. 2019;2(1):8-17.
- [21] Achjar KAH, Rusliyadi M, Zaenurrosyid A, Rumata NA, Nirwana I, Abadi A. METODE PENELITIAN KUALITATIF: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus: PT. Sonpedia Publishing Indonesia; 2023.
- [22] Febriani ES, Arobiah D, Apriyani A, Ramdhani E, Millah AS. Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*. 2023;1(2):140-53.
- [23] Jalinus N, Risfendra R. Analisis kemampuan pedagogi guru smk yang sedang mengambil pendidikan profesi guru dengan metode deskriptif kuantitatif dan metode kualitatif. *INVOTEK: Jurnal Inovasi Vokasional Dan Teknologi*. 2020;20(1):37-44.
- [24] Fitria N, Setiawan R. Identifikasi karakteristik lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. *Jurnal Teknik ITS*. 2014;3(2):C240-C4.
- [25] Nursyahbani R, Pigawati B. Kajian Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh di Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang). *Teknik PWK*. 2015;4(2):267-81.

